



PENGOLAHAN SAMPAH NASIONAL

Strategi PSEL Lebih Baik dari TPA

YOGYA (MERAPI) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X turut hadir pada Rapat Koordinasi Nasional Pengolah Sampah Menjadi Energi (Waste to Energy) di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (30/9).

Acara yang digelar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ini membahas peningkatan efektivitas pengelolaan sampah secara nasional.

CEO BPI Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan, pengelolaan sampah nasional akan dilakukan melalui program Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WtE). Program ini diakuinya telah dirintis sejak 7-8 tahun yang lalu oleh pemerintah, meski selama ini memang belum optimal dilakukan.

"Program PSEL ini telah disiapkan sebagai langkah

strategis pemerintah untuk mengurangi timbunan sampah, pengolahan sampah terpadu, sekaligus meningkatkan sumber energi terbarukan. Karena jika dibandingkan dengan pengolahan sampah di TPA, manfaat PSEL lebih banyak," ungkapnya.

Menurut Rosan, setidaknya terdapat lima manfaat utama dari PSEL, yakni pengurangan emisi, pencegahan polusi, menciptakan energi terbarukan, meningkatkan pemanfaatan lahan, serta bermanfaat dalam bidang sosial dan ekonomi. Ia pun menjelaskan, program ini akan segera diluncurkan pada akhir Oktober 2025.

"Kami menargetkan 33 ko-

ta di Indonesia, dan proyek ini akan mengimplementasikan teknologi WtE untuk mengubah sampah menjadi energi, dengan dukungan dari PT PLN (Persero) dalam hal pengolahan dan pembebasan tipping fee," papar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM ini.

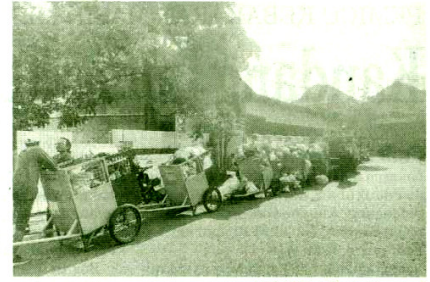
Rosan memaparkan, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan 35 juta ton sampah, di mana sekitar 61% dari total sampah tersebut tidak terkelola dengan baik. Hal ini membuat Indonesia tengah menghadapi krisis sampah yang semakin mengkhawatirkan.

"Untuk itu, kami meyakini bahwa PSEL atau WtE adalah satu solusi jangka panjang yang bisa menyatukan isu lingkungan, kesehatan dan energi. Ini adalah suatu langkah yang nyata bagaimana kita berkontribusi pada transisi energi terbarukan," tandasnya.

Sebagai informasi, Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat masyarakat Indonesia memproduksi 136 ribu ton sampah setiap harinya. Sebagian besar sampah tersebut berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mayoritas sudah melebihi kapasitas.

Sementara, kebijakan menambah TPA baru dianggap tidak lagi memadai. Selain keterbatasan lahan, TPA juga menyumbang emisi gas metana setara 2-3% emisi nasional.

Lebih lanjut, Rosan menuturkan, pengolahan sampah menjadi energi mampu mengurangi emisi gas rumah kaca mencapai 50%-80% dan menghemat 90% penggunaan lahan. Untuk itu, Rosan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam penyediaan 1.000 ton sampah perhari, di mana dari jumlah tersebut



MERAPI-Dok Pemkot Yogyakarta

Ilustrasi - Antrean penggerobak sampah masuk depo di Kota Yogyakarta.

diprediksi dapat menghasilkan energi sebesar 15 megawatt dan bisa berkontribusi energi bagi kurang lebih 20.000 rumah tangga.

"Selain dapat menghasilkan investasi jangka panjang dan berkelanjutan, manfaat proyek waste to energy salah satunya dapat menekan ang-

garan APBD. Jika sebelumnya pemerintah daerah mengeluarkan tipping fee atau biaya saat mengirimkan sampah ke fasilitas pengolahan limbah seperti TPA atau fasilitas pengolah sampah lainnya, dengan skema yang baru ini, biaya tersebut tidak ada lagi," jelasnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005